



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk dilakukan pembahasan bersama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mendapatkan persetujuan bersama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61730);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.171.170.991.467,81	
b. Belanja	Rp1.151.865.518.264,71	
Surplus/(defisit)		Rp19.305.473.203,10
c. Transfer	Rp195.338.655.363,00	
Surplus/(defisit)		Rp(176.033.182.159,90)
d. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp317.260.758.730,75	
Pengeluaran	Rp0,00	
Pembiayaan Netto		Rp317.260.758.730,75

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp5.075.842.890,19 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.176.246.834.358,00
  - b. Realisasi Rp1.171.170.991.467,81
- Selisih lebih / (kurang) Rp5.075.842.890,19

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp142.957.912.319,04 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp1.294.823.430.583,75 |
| b. Realisasi                          | Rp1.151.865.518.264,71 |
| Selisih lebih/(kurang)                | Rp142.957.912.319,04   |
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp(137.882.069.428,85) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp(118.576.596.225,75) |
| b. Realisasi                          | Rp19.305.473.203,10    |
| Selisih lebih/(kurang)                | Rp(137.882.069.428,85) |
4. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp3.425.481.087,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Anggaran transfer setelah perubahan | Rp198.764.136.450,00 |
| b. Realisasi                           | Rp195.338.655.363,00 |
| Selisih lebih/(kurang)                 | Rp3.425.481.087,00   |
5. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp(141.307.550.515,85) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp(317.340.732.675,75) |
| b. Realisasi                          | Rp(176.033.182.159,90) |
| Selisih lebih/(kurang)                | Rp(141.307.550.515,85) |
6. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp79.973.945,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp317.340.732.675,75 |
| b. Realisasi  | Rp317.260.758.730,75 |
| Selisih lebih/(kurang)                              | Rp79.973.945,00      |
7. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |        |
|--|--------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp0,00 |
| b. Realisasi   | Rp0,00 |
| Selisih lebih/(kurang)                               | Rp0,00 |

8. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp79.973.945,00 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp317.340.732.675,75
b. Realisasi	Rp317.260.758.730,75
Selisih lebih/(kurang)	Rp79.973.945,00

#### Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp317.340.232.675,75
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp317.246.508.730,75
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp141.227.576.570,85
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp(93.723.945,00)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp141.227.576.570,85

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp2.545.528.571.783,86
b. Jumlah kewajiban	Rp164.076.190.873,49
c. Jumlah ekuitas	Rp2.381.452.380.910,37

#### Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.087.799.574.651,52
b. Beban	Rp1.180.885.728.870,12
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp(9.348.068.787,00)
d. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp(102.434.223.005,60)
e. Pos Luar Biasa	Rp0,00
f. Surplus/Defisit – LO	Rp(102.434.223.005,60)

## Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp317.340.232.675,75
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp97.334.295.477,10
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp(273.353.227.637,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp0,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp(92.748.945,00)
f. Arus kas akhir per 31 Desember 2019	Rp141.265.091.441,85

## Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp2.376.042.726.604,89
b. Surplus/Defisit – LO	Rp(102.434.223.005,60)
c. Dampak Kumulatif dari Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp107.843.877.311,08
d. Ekuitas Akhir	Rp2.381.452.380.910,37

## Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi

- dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Lampiran III : Laporan operasional;
  - d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
  - e. Lampiran V : Neraca;
  - f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
  - g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
  - h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
  - i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  - j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
  - k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
  - n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
  - o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
  - p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
  - q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
  - r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
  - s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

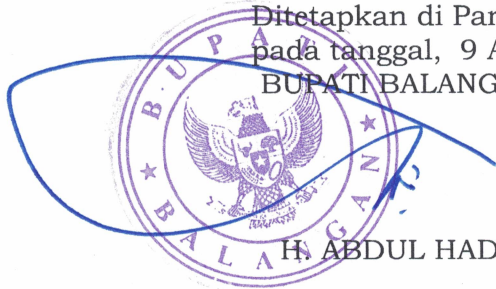
BAB III  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal, 9 Agustus 2021  
BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal, 9 Agustus 2021  
PLH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



YULIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (4-78/2021)

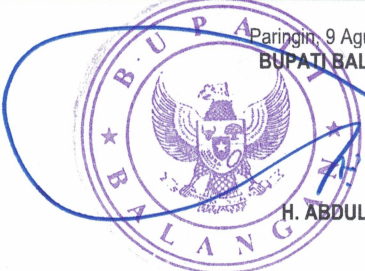


**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	11.745.022.948.00	13.378.574.067.00	113.91	13.420.168.379.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	1.656.949.000.00	1.675.985.562.00	101.15	1.865.673.675.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.848.192.278.00	9.827.731.257.00	99.79	6.596.245.516.00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.215.036.019.00	61.294.319.267.81	141.84	60.640.440.655.07
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>66.465.200.245.00</b>	<b>86.176.610.153.81</b>	<b>129.66</b>	<b>82.522.528.225.07</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	30.000.788.666.00	21.092.476.251.00	70.31	21.517.651.852.00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	310.495.196.383.00	308.097.303.689.00	99.23	651.448.518.564.00
13	Dana Alokasi Umum	354.448.216.000.00	352.411.306.000.00	99.43	392.667.124.000.00
14	Dana Alokasi Khusus	130.714.692.000.00	126.354.368.088.00	96.66	135.946.738.873.00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>825.658.893.049.00</b>	<b>807.955.454.028.00</b>	<b>97.86</b>	<b>1.201.580.033.289.00</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian	181.960.552.000.00	180.919.681.500.00	99.43	129.576.750.400.00
20	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>181.960.552.000.00</b>	<b>180.919.681.500.00</b>	<b>99.43</b>	<b>129.576.750.400.00</b>
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	71.788.437.222.00	59.906.832.441.00	83.45	77.563.456.550.00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>71.788.437.222.00</b>	<b>59.906.832.441.00</b>	<b>83.45</b>	<b>77.563.456.550.00</b>
26	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	<b>1.079.407.882.271.00</b>	<b>1.048.781.967.969.00</b>	<b>97.16</b>	<b>1.408.720.240.239.00</b>
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah	18.383.700.000.00	18.000.810.000.00	97.92	23.005.955.503.00
30	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
31	Pendapatan Lainnya	11.990.051.842.00	18.211.603.345.00	151.89	-
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>30.373.751.842.00</b>	<b>36.212.413.345.00</b>	<b>119.22</b>	<b>23.005.955.503.00</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>1.176.246.834.358.00</b>	<b>1.171.170.991.467.81</b>	<b>99.57</b>	<b>1.514.248.723.967.07</b>
34					
35	<b>BELANJA</b>				
36	<b>BELANJA OPERASI</b>				
37	Belanja Pegawai	418.952.932.127.27	379.657.162.332.00	90.62	343.730.393.485.00
38	Belanja Barang	404.150.311.823.48	372.416.851.683.71	92.15	420.688.850.012.00
39	Belanja Bunga	-	-	-	-
40	Belanja Subsidi	-	-	-	-
41	Belanja Hibah	84.471.982.871.00	81.202.547.835.00	96.13	78.127.756.803.00
42	Belanja Bantuan Sosial	5.842.125.000.00	4.333.900.000.00	74.18	5.574.420.000.00
43	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
44	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
45	<b>Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 44)</b>	<b>913.417.351.821.75</b>	<b>837.610.461.850.71</b>	<b>91.70</b>	<b>848.121.420.300.00</b>
46					
47	<b>BELANJA MODAL</b>				
48	Tanah	925.400.000.00	902.599.000.00	97.54	7.949.691.000.00
49	Peralatan dan Mesin	54.870.827.268.00	51.241.769.111.00	93.39	50.657.647.520.00
50	Gedung dan Bangunan	86.780.794.849.00	79.756.919.590.00	91.91	52.864.332.300.00
51	Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.170.954.795.00	140.356.046.223.00	96.02	186.482.389.803.53
52	Aset Tetap Lainnya	40.000.000.00	40.000.000.00	100.00	78.711.460.00
53	Aset Lainnya	1.123.200.000.00	1.107.191.000.00	98.57	359.343.000.00
54	<b>Jumlah Belanja Modal (48 s/d 53)</b>	<b>289.911.176.912.00</b>	<b>273.404.524.924.00</b>	<b>94.31</b>	<b>298.392.115.083.53</b>
55					
56	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
57	Belanja Tak Terduga	91.494.901.850.00	40.850.531.490.00	44.65	981.745.000.00
58	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (57)</b>	<b>91.494.901.850.00</b>	<b>40.850.531.490.00</b>	<b>44.65</b>	<b>981.745.000.00</b>
59	<b>JUMLAH BELANJA (45 + 54 + 58)</b>	<b>1.294.823.430.583.75</b>	<b>1.151.865.518.264.71</b>	<b>88.96</b>	<b>1.147.495.280.383.53</b>
60					
61	<b>SURPLUS/ DEFISIT (33 - 59)</b>	<b>(118.576.596.225.75)</b>	<b>19.305.473.203.10</b>	<b>(16.28)</b>	<b>366.753.443.583.54</b>

NO.	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6
62					
63	<b>TRANSFER</b>				
64	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>				
65	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.174.502.300.00	1.167.940.423.00	99.44	1.071.926.700.00
66	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	166.644.000.00	165.901.680.00	99.55	176.678.300.00
67	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	<b>1.341.146.300.00</b>	<b>1.333.842.103.00</b>	<b>99.46</b>	<b>1.248.605.000.00</b>
68					
69	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>				
70	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	197.422.990.150.00	194.004.813.260.00	98.27	207.185.464.200.00
71	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	670.578.500.00
72	<b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>197.422.990.150.00</b>	<b>194.004.813.260.00</b>	<b>98.27</b>	<b>207.856.042.700.00</b>
73					
74	<b>JUMLAH TRANSFER (67 + 72)</b>	<b>198.764.136.450.00</b>	<b>195.338.655.363.00</b>	<b>98.28</b>	<b>209.104.647.700.00</b>
75					
76	<b>SURPLUS/ DEFISIT (61 - 74)</b>	<b>(317.340.732.675.75)</b>	<b>(176.033.182.159.90)</b>	<b>55.47</b>	<b>157.648.795.883.54</b>
77					
78	<b>PEMBIAYAAN</b>				
79					
80	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
81	Penggunaan SILPA	317.340.232.675.75	317.246.508.730.75	99.97	159.678.666.792.21
82	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
83	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
84	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
85	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
86	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
87	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
88	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
89	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-
90	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
91	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (Koperasi)	-	-	-	-
92	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
93	Penerimaan dari Sisa UYHD Tahun Lalu	-	-	-	-
94	Penerimaan Piutang Pihak Ketiga	-	-	-	-
95	Penerimaan atas Investasi Permanen	500.000.00	14.250.000.00	2.850.00	12.770.000.00
96	<b>Jumlah Penerimaan (81 s/d 95)</b>	<b>317.340.732.675.75</b>	<b>317.260.758.730.75</b>	<b>99.97</b>	<b>159.691.436.792.21</b>
97					
98	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
99	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
100	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
101	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
102	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
103	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
104	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
105	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
106	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-
107	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
108	Pengembalian Dana DPPID	-	-	-	-
109	<b>Jumlah Pengeluaran (99 s/d 108)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
110	<b>PEMBIAYAAN NETTO (96 - 109)</b>	<b>317.340.732.675.75</b>	<b>317.260.758.730.75</b>	<b>99.97</b>	<b>159.691.436.792.21</b>
111					
112	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (76 + 110)</b>	<b>-</b>	<b>141.227.576.570.85</b>	<b>-</b>	<b>317.340.232.675.75</b>

Paringin, 9 Agustus 2021  
**BUPATI BALANGAN,**  
  
**H. ABDUL HADI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020	2019
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	317.340.232.675.75	159.678.666.792.21
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	317.246.508.730.75	159.678.666.792.21
3	Sub Total ( 1 - 2 )	93.723.945.00	-
4			
5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA)	141.227.576.570.85	317.340.232.675.75
6	Sub Total ( 3 + 5 )	141.321.300.515.85	317.340.232.675.75
7			
8	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(93.723.945.00)	-
9	Lain-lain	-	-
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir ( 6 s/d 9 )</b>		<b>141.227.576.570.85</b>	<b>317.340.232.675.75</b>

Paringin, 9 Agustus 2021

**BUPATI BALANGAN,**
**H. ABDUL HADI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER TAHUN 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	2020	2019
1	2	3	4
1	<b>ASET</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>		
3	Kas di Kas Daerah	121.452.973.846.84	211.046.431.453.27
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	975.000.00	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
6	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	518.861.272.00	529.387.452.00
7	Kas di Bendahara BLUD	18.051.216.461.01	16.777.061.449.48
8	Kas di Bendahara BOS	1.204.524.991.00	4.702.999.677.00
9	Kas Lain-lain	-	84.284.352.644.00
10	Setara Kas	36.539.871.00	36.539.871.00
11	Piutang Pajak	2.071.333.071.00	2.189.879.779.00
12	Penyisihan Piutang Pajak	(1.208.173.953.00)	(1.001.081.732.00)
13	Piutang Pajak Netto	863.159.118.00	1.188.798.047.00
14	Piutang Retribusi	63.859.005.00	72.299.460.00
15	Penyisihan Piutang Retribusi	(45.992.512.00)	(33.274.521.00)
16	Piutang Retribusi Netto	17.866.493.00	39.024.939.00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.156.266.560.50	8.555.926.258.83
18	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(10.781.332.82)	(42.779.631.30)
19	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	2.145.485.227.68	8.513.146.627.53
20	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	34.180.831.191.00	3.915.032.503.00
21	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
22	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto	34.180.831.191.00	3.915.032.503.00
23	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-
24	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-
25	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Netto	-	-
26	Piutang Dana Bagi Hasil	22.300.065.176.47	23.657.745.530.00
27	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	-	(118.288.727.66)
28	Piutang Dana Bagi Hasil Netto	22.300.065.176.47	23.539.456.802.34
29	Piutang Kepada Pihak Ketiga	-	-
30	Piutang Lainnya	-	-
31	Penyisihan Piutang	-	-
32	Beban Dibayar Dimuka	-	-
33	Persediaan	11.502.311.810.00	11.443.088.281.00
34	<b>Jumlah Aset Lancar ( 3 s/d 33 )</b>	<b>212.274.810.458.00</b>	<b>366.015.319.746.62</b>
35	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
36	<b>Investasi Nonpermanen</b>		
37	Dana Bergulir	673.300.000.00	630.850.000.00
38	Penyisihan Dana Bergulir	(673.300.000.00)	(630.850.000.00)
39	Dana Bergulir Netto	-	-
40	Dana Talangan	-	-
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	208.118.000.00	214.568.000.00
42	<b>Jumlah Investasi Non Permanen ( 39 s/d 41 )</b>	<b>208.118.000.00</b>	<b>214.568.000.00</b>
43	<b>Investasi Permanen</b>		
44	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	197.609.093.257.86	201.626.984.028.70
45	<b>Jumlah Investasi Permanen ( 44 )</b>	<b>197.609.093.257.86</b>	<b>201.626.984.028.70</b>
46	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang ( 42 + 45 )</b>	<b>197.817.211.257.86</b>	<b>201.841.552.028.70</b>
47	<b>ASET TETAP</b>		
48	Tanah	488.482.307.045.00	489.395.642.968.00
49	Peralatan dan Mesin	394.555.253.493.00	334.211.933.955.00
50	Gedung dan Bangunan	920.201.823.509.00	828.499.688.464.00
51	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.823.269.189.518.00	1.665.463.196.942.00
52	Aset Tetap Lainnya	8.052.807.988.00	7.815.510.170.00

No.	URAIAN	2020	2019
1	2	3	4
53	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.852.802.238.00	54.128.015.238.00
54	Akumulasi Penyusutan	(1.533.784.212.702.00)	(1.426.601.174.219.00)
55	<b>Jumlah Aset Tetap ( 48 s/d 54 )</b>	<b>2.113.629.971.089.00</b>	<b>1.952.912.813.518.00</b>
56	<b>DANA CADANGAN</b>		
57	Dana Cadangan	-	-
58	<b>Jumlah Dana Cadangan ( 57 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
59	<b>ASET LAINNYA</b>		
60	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-
61	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	19.150.000.00	19.150.000.00
62	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara	-	10.748.500.00
63	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
64	Aset Tidak Berwujud	2.692.599.050.00	1.585.408.050.00
65	Akumulasi Amortisasi	(1.389.564.850.00)	(907.689.290.00)
66	Aset Non Lancar Lainnya	-	-
66	Aset Lain-lain	62.272.794.441.00	68.082.276.393.00
67	Akumulasi Aset Lain-lain	(41.788.399.662.00)	(45.119.629.771.00)
68	<b>Jumlah Aset Lainnya ( 60 s/d 67 )</b>	<b>21.806.578.979.00</b>	<b>23.670.263.882.00</b>
69	<b>TOTAL ASET ( 34 + 46 + 55 + 58 + 68 )</b>	<b>2.545.528.571.783.86</b>	<b>2.544.439.949.175.32</b>
70			
71	<b>KEWAJIBAN</b>		
72	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
73	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	975.000.00	-
74	Utang Bunga Denda dan Commitment Fee	-	-
75	Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat	-	-
76	Pendapatan Diterima Dimuka	103.450.522.33	243.805.045.44
77	Utang Beban	3.686.715.599.16	9.031.550.574.00
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	160.285.049.752.00	159.121.866.951.00
79	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek ( 73 s/d 78 )</b>	<b>164.076.190.873.49</b>	<b>168.397.222.570.44</b>
80			
81	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
82	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
83	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang ( 82 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
84			
85	<b>TOTAL KEWAJIBAN ( 79 + 83 )</b>	<b>164.076.190.873.49</b>	<b>168.397.222.570.44</b>
86			
87	<b>EKUITAS DANA</b>		
88	Ekuitas Dana	2.381.452.380.910.37	2.376.042.726.604.88
89			
90	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA ( 85 + 88 )</b>	<b>2.545.528.571.783.86</b>	<b>2.544.439.949.175.32</b>

Paringin, 9 Agustus 2021  
**BUPATI BALANGAN,**

**H. ABDUL HADI**

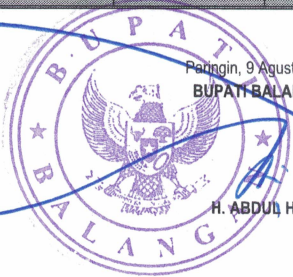


**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	4	5	6	7
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	13.260.704.881,76	13.710.395.430,47	(449.690.548,71)	(3,28)
4	Pendapatan Retribusi Daerah	1.790.922.084,97	1.955.612.427,19	(164.690.342,22)	(8,42)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.208.793.050,20	7.356.323.474,66	2.852.469.575,54	38,78
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.171.311.514,12	59.964.691.429,66	(4.793.379.915,54)	(7,99)
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>80.431.731.531,05</b>	<b>82.987.022.761,98</b>	<b>(2.555.291.230,93)</b>	<b>(3,08)</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	23.374.397.928,00	23.922.285.951,00	(547.888.023,00)	(2,29)
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	336.081.180.700,00	495.849.286.017,00	(159.768.105.317,00)	(32,22)
13	Dana Alokasi Umum	352.411.306.000,00	400.091.773.000,00	(47.680.467.000,00)	(11,92)
14	Dana Alokasi Khusus	126.354.368.088,00	135.946.738.873,00	(9.592.370.785,00)	(7,06)
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>838.221.252.716,00</b>	<b>1.055.810.083.841,00</b>	<b>(217.588.831.125,00)</b>	<b>(20,61)</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian	62.346.727.000,00	12.295.158.000,00	50.051.569.000,00	407,08
20	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>62.346.727.000,00</b>	<b>12.295.158.000,00</b>	<b>50.051.569.000,00</b>	<b>407,08</b>
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.549.152.087,47	71.555.124.898,00	(13.005.972.810,53)	(18,18)
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>58.549.152.087,47</b>	<b>71.555.124.898,00</b>	<b>(13.005.972.810,53)</b>	<b>(18,18)</b>
26	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	<b>959.117.131.803,47</b>	<b>1.139.660.366.739,00</b>	<b>(180.543.234.935,53)</b>	<b>(15,84)</b>
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah	30.083.949.102,00	30.323.738.433,40	(239.789.331,40)	(0,79)
30	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
31	Pendapatan Lainnya	18.166.762.215,00	36.539.871,00	18.130.222.344,00	-
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>48.250.711.317,00</b>	<b>30.360.278.304,40</b>	<b>17.890.433.012,60</b>	<b>58,93</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>1.087.799.574.651,52</b>	<b>1.253.007.667.805,38</b>	<b>(165.208.093.153,86)</b>	<b>(13,18)</b>
34					
35	<b>BEBAN</b>				
36	Beban Pegawai	379.433.267.079,00	343.957.843.485,00	35.475.423.594,00	10,31
37	Beban Persediaan	105.222.181.874,00	99.984.533.571,00	5.237.648.303,00	5,24
38	Beban Jasa	180.331.970.761,00	174.639.253.967,00	5.692.716.794,00	3,26
39	Beban Pemeliharaan	25.462.484.683,00	37.877.384.016,00	(12.414.899.333,00)	(32,78)
40	Beban Perjalanan Dinas	81.822.262.346,00	112.026.520.538,00	(30.204.258.192,00)	(26,96)
41	Beban Bunga	-	-	-	-
42	Beban Subsidi	-	-	-	-
43	Beban Hibah	88.515.643.830,00	76.890.944.123,00	11.624.699.707,00	15,12
44	Beban Bantuan Sosial	5.426.098.672,00	5.574.420.000,00	(148.321.328,00)	(2,66)

NO.	URAIAN	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	4	5	6	7
45	Beban Penyusutan	231.235.149.221.00	225.781.548.331.00	5.453.600.890.00	2.42
46	Beban Amortisasi	481.875.560.00	280.124.710.00	201.750.850.00	72.02
47	Beban Penyisihan Piutang	222.541.757.00	155.182.035.20	67.359.721.80	43.41
48	Beban Penyisihan Dana Bergulir	-	-	-	-
49	Beban Transfer	76.765.700.863.00	92.058.490.700.00	(15.292.789.837.00)	(16.61)
50	Beban Lain-lain	5.966.552.224.12	5.409.285.538.43	557.266.685.69	10.30
51	<b>JUMLAH BEBAN (36 s/d 50)</b>	<b>1.180.885.728.870.12</b>	<b>1.174.635.531.014.63</b>	<b>6.250.197.855.49</b>	<b>0.53</b>
52					
53	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (33 - 51)</b>	<b>(93.086.154.218.60)</b>	<b>78.372.136.790.75</b>	<b>(171.458.291.009.35)</b>	<b>(218.77)</b>
54					
55	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
56	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	37.047.287.00	-	37.047.287.00	-
57	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
58	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-	-
59	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
60	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(9.385.116.074.00)	(29.214.140.491.86)	19.829.024.417.86	(67.87)
61	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (56 s/d 60)</b>	<b>(9.348.068.787.00)</b>	<b>(29.214.140.491.86)</b>	<b>19.866.071.704.86</b>	<b>(68.00)</b>
62	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (53 + 61)</b>	<b>(102.434.223.005.60)</b>	<b>49.157.996.298.89</b>	<b>(151.592.219.304.49)</b>	<b>(308.38)</b>
63					
64	<b>POS LUAR BIASA</b>				
65	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
66	Beban Luar Biasa	-	434.270.000.00	-	-
67	<b>POS LUAR BIASA (65 - 66)</b>	<b>-</b>	<b>(434.270.000.00)</b>	<b>434.270.000.00</b>	<b>-</b>
68	<b>SURPLUS/DEFISIT - LO (62 + 67)</b>	<b>(102.434.223.005.60)</b>	<b>48.723.726.298.89</b>	<b>(151.157.949.304.49)</b>	<b>(310.23)</b>


  
 Padangin, 9 Agustus 2021  
**BUPATI BALANGAN,**  
  
**H. ABDUL HADI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	2020	2019
1	EKUITAS AWAL	2.376.042.726.604.89	2.327.953.057.600.08
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(102.434.223.005.60)	48.723.726.298.89
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: ( 4 s/d 14 )	107.843.877.311.08	(634.057.294.08)
4	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
6	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	(6.514.186.729.00)	1.849.388.499.07
7	Koreksi Ekuitas - Penyusutan	117.651.988.707.00	(969.301.084.00)
8	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	1.004.712.72	-
9	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(50.250.000.00)	-
10	Koreksi Ekuitas - Extra Comptable	2.200.000.00	(13.496.000.00)
11	Koreksi Ekuitas - Utang Beban	19.120.158.00	73.095.300.00
12	Koreksi Ekuitas - Amortisasi	-	-
13	Koreksi Ekuitas - Piutang	(2.424.720.85)	(1.479.130.950.00)
14	Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang	5.568.010.08	(1.116.752.494.00)
15	Koreksi Ekuitas - Lainnya	(3.269.142.826.87)	1.022.139.434.85
16	<b>EKUITAS AKHIR ( 1 + 2 + 3 )</b>	<b>2.381.452.380.910.37</b>	<b>2.376.042.726.604.89</b>

Paringin, 9 Agustus 2021

**BUPATI BALANGAN,**

**H. ABDUL HADI**

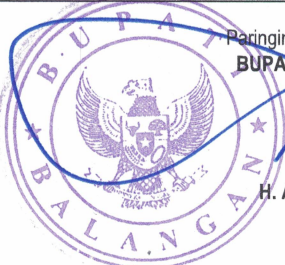


**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2020	2019
1	2	4	5
<b>1</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>2</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah	13.378.574.067,00	13.420.168.379,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	1.675.985.562,00	1.865.673.675,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.827.731.257,00	6.596.245.516,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	61.257.271.980,81	60.026.165.655,07
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	21.092.476.251,00	21.517.651.852,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	308.097.303.689,00	651.448.518.564,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	352.411.306.000,00	392.667.124.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	126.354.368.088,00	135.946.738.873,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	180.919.681.500,00	129.576.750.400,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.906.832.441,00	77.563.456.550,00
13	Penerimaan Hibah	18.000.810.000,00	23.005.955.503,00
14	Penerimaan Lainnya	18.211.603.345,00	-
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
<b>16</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas ( 3 s/d 15)</b>	<b>1.171.133.944.180,81</b>	<b>1.513.634.448.967,07</b>
<b>17</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
18	Pembayaran Pegawai	379.657.162.332,00	343.730.393.485,00
19	Pembayaran Barang	372.416.851.683,71	420.688.850.012,00
20	Pembayaran Bunga	-	-
21	Pembayaran Subsidi	-	-
22	Pembayaran Hibah	81.202.547.835,00	78.127.756.803,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	4.333.900.000,00	5.574.420.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	194.004.813.260,00	207.856.042.700,00
25	Pembayaran Tak Terduga	40.850.531.490,00	981.745.000,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.167.940.423,00	1.071.926.700,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	165.901.680,00	176.678.300,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan lainnya	-	-
29	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
<b>30</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 29)</b>	<b>1.073.799.648.703,71</b>	<b>1.058.207.813.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 30)</b>	<b>97.334.295.477,10</b>	<b>455.426.635.967,07</b>
<b>32</b>			
<b>33</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>		
<b>34</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
35	Pencairan Dana Cadangan	-	-
36	Penjualan atas Tanah	-	-
37	Penjualan atas Mesin dan Peralatan	37.047.287,00	614.275.000,00
38	Penjualan atas Bangunan dan Gedung	-	-
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
41	Penjualan Aset Lainnya	-	-
42	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.250.000,00	12.770.000,00
<b>43</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (35 s/d 42)</b>	<b>51.297.287,00</b>	<b>627.045.000,00</b>
<b>44</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
45	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
46	Perolehan Tanah	902.599.000,00	7.949.691.000,00
47	Perolehan Peralatan dan Mesin	51.241.769.111,00	50.657.647.520,00
48	Perolehan Gedung dan Bangunan	79.756.919.590,00	52.864.332.300,00
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	140.356.046.223,00	186.482.389.803,53
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	78.711.460,00
51	Perolehan Aset Lainnya	1.107.191.000,00	359.343.000,00
52	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
<b>54</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 53)</b>	<b>273.404.524.924,00</b>	<b>298.392.115.083,53</b>
<b>55</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (43 - 54)</b>	<b>(273.353.227.637,00)</b>	<b>(297.765.070.083,53)</b>

No.	URAIAN	2020	2019
1	2	4	5
56			
57	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
58	<b>Arus Masuk Kas</b>		
59	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-
60	Penerimaan atas Investasi Permanen	-	-
61	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (59 s/d 60)</b>	-	-
62	<b>Arus Keluar Kas</b>		
63	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
64	Pembayaran Pokok Utang	-	-
65	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (63 s/d 64)</b>	-	-
66	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 65)</b>	-	-
67			
68	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS / NON ANGGARAN</b>		
69	<b>Arus Masuk Kas</b>		
70	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
71	IWP	13.340.354.899.92	13.913.902.542.00
72	Taperum	174.935.000.00	269.423.000.00
73	PPh 21	14.936.093.499.00	12.179.277.749.00
74	PPh 22	864.790.646.00	1.055.102.312.00
75	PPh 23	190.957.947.00	221.428.557.00
76	Pasal 4 (2)	5.297.939.319.00	5.804.186.968.17
77	PPN	27.404.971.988.00	32.239.068.565.45
78	Lain-lain	42.999.706.00	12.855.00
79	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (71 s/d 78)</b>	<b>62.253.043.004.92</b>	<b>65.682.402.548.62</b>
80	<b>Arus Keluar Kas</b>		
81	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
82	IWP	13.340.354.899.92	13.913.902.542.00
83	Taperum	174.935.000.00	269.423.000.00
84	PPh 21	14.936.093.499.00	12.179.277.749.00
85	PPh 22	864.790.646.00	1.055.102.312.00
86	PPh 23	190.957.947.00	221.428.557.00
87	Pasal 4 (2)	5.297.939.319.00	5.804.186.968.17
88	PPN	27.404.971.988.00	32.239.068.565.45
89	Lain-lain	135.748.651.00	12.855.00
90	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (82 s/d 89)</b>	<b>62.345.791.949.92</b>	<b>65.682.402.548.62</b>
91	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris / Non Anggaran (79 - 90)</b>	<b>(92.748.945.00)</b>	-
92			
93	<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (31 + 55 + 66 + 91)</b>	<b>(176.111.681.104.90)</b>	<b>157.661.565.883.54</b>
94	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP, Penerimaan, Pengeluaran	317.340.232.675.75	159.678.666.792.21
95	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP, BOS, Penerimaan, Pengeluaran (93 + 94)	141.228.551.570.85	317.340.232.675.75
96	Saldo Akhir Kas di BUD	121.452.973.846.84	211.046.431.453.27
97	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	18.051.216.461.01	16.777.061.449.48
98	Saldo Akhir Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	518.861.272.00	529.387.452.00
99	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	975.000.00	-
100	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
101	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	1.204.524.991.00	4.702.999.677.00
102	Saldo Akhir Setara Kas	-	84.284.352.644.00
103	Saldo Kas Lain-lain	36.539.871.00	36.539.871.00
104	<b>Saldo Akhir Kas (96 s/d 103)</b>	<b>141.265.091.441.85</b>	<b>317.376.772.546.75</b>

Peringin, 9 Agustus 2021  
**BUPATI BALANGAN,**  
  
**H. ABDUL HADI**